

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Ditengah arah pembangunan kota yang semakin modern dan berbasis teknologi, tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan fungsi lahan menjadi salah satu kegiatan yang harus dilakukan, tidak terkecuali Kota Malang. Data yang diungkap oleh *Research Group Geoinformatics (RGG)*, Fakultas ilmu komputer Universitas Brawijaya Malang menyatakan bahwa tahun 2017 luas wilayah yang saat ini difungsikan sebagai tempat tinggal dan industri kini menjadi 64 persen dari luas wilayahnya (Subagiyo, 2019). Hal tersebut berdampak kepada menurunnya luas lahan alami menjadi 30 persen saja (Choirul, 2017).

Badan Pusat Statistika Kota Malang juga menampilkan data yang menyatakan bahwa penggunaan lahan bukan pertanian dari tahun 2017 menuju tahun 2018 mengalami peningkatan. Tahun 2017 penggunaan lahan bukan pertanian berada dalam angka 7.827 hektare, namun pada tahun 2018 penggunaan lahan bukan pertanian mengalami peningkatan menjadi 8.197 hektare (BPS, 2018). Kecenderungan untuk melakukan alih fungsi lahan juga berdampak kepada luasan lahan pertanian yang ada di Kota Malang, data menunjukkan bahwa pada bulan Maret tahun 2019 luas lahan pertanian pangan di Kota Malang hanya tersisa 5,6 persen atau hanya 821 hektare dari total luas wilayah yang mencapai 11.055,66 hektar (Berita Radio Republik Indonesia, 2019). Fakta lain juga menunjukkan bahwa luas lahan pertanian di Kota Malang menyusut hingga 5 persen setiap tahunnya.

Ditinjau dari segi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang pada Tahun 2010 hingga 2030, pertanian memang bukan prioritas utama dari Kota Malang. Dari lima sub pusat pelayanan kota, sub sektor pertanian hanya berada dalam pelayanan sekunder yang ada di kawasan Malang Barat, Kecamatan Sukun. Ketika Perda RTRW ini dianalisis menggunakan data yang didapat melalui Badan Pusat Statistika tentang luasan lahan pertanian di Kota Malang memang menimbulkan pertanyaan. Data tersebut menyatakan bahwa Kecamatan dengan luasan lahan pertanian adalah Kecamatan Kedungkandang dengan luas 551 hektare untuk tanaman pangan (BPS, 2018). Lantas pertanyaan yang timbul mengapa daerah dengan lahan pertanian yang memadai tidak dijadikan sebagai zonasi sub sektor pertanian. Fenomena tersebut juga semakin menjelaskan bahwa sub sektor pertanian bukan prioritas Kota Malang.

Dengan kondisi sedemikian rupa, maka Kota Malang tidak dapat menjadi produsen bagi kebutuhan pangan masyarakat mereka sendiri, Kota Malang bergantung kepada daerah-daerah lain untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Dengan kondisi luasan lahan pertanian yang telah dijelaskan diatas maka Kota Malang hanya dapat memproduksi 13.650 ton tanaman pangan pada tahun 2018. Dari tahun ke tahun produksi beras di Kota Malang semakin menurun, hal ini dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistika sebagai berikut:

Tabel 1.1: Produksi Padi di Kota Malang tiga tahun terakhir

	2016	2017	2018
Kota Malang	14.347	14.070	13.650

Sumber: Badan Pusat Statistika Jawa Timur 2019

Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi dan kebutuhan pangan masyarakat Kota Malang yang memiliki rata-rata konsumsi 115 kg/orang untuk jangka waktu satu tahun (NST, 2019). Dari data yang didapatkan diatas maka setidaknya pemerintah Kota Malang harus menyediakan 96.700 ton/tahun untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat yang berjumlah 895.367 ribu jiwa (BPS, 2019). Data penduduk diatas belum termasuk dengan jumlah pendatang dan mahasiswa yang bermukim di Kota Malang, mengingat selain dikenal dengan kota bunga, pada saat ini Kota Malang juga diketahui banyak orang sebagai salah satu kota di Indonesia dengan basis pendidikan yang kuat.

Kondisi diatas juga diperparah dengan penurunan jumlah petani yang ada di Kota Malang, menurut statistic yang dipaparkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang jumlah presentasi petani hanya sebesar 0,059 persen. Dari 895.367 jiwa penduduk sebanyak 533 orang yang menjadi petani (Tolena, 2018). Penurunan jumlah petani memang menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, dengan perkembangan zaman yang sedemikian rupa maka masyarakat lebih tertarik untuk berkarir dibidang pariwisata, industri, dan berbagai macam profesi lain yang berjalan beriringan dengan perkembangan zaman.

Mengacu kepada pembangunan berkelanjutan terdapat salah satu tujuan yang berisi negara tanpa kelaparan, tanpa kelaparan disini berarti bahwa pemerintah

harus menciptakan ketahanan pangan, pemberian gizi yang cukup, serta sektor pertanian yang berkelanjutan. Adapun tujuan dari tanpa kelaparan yang tertera dalam pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut (Stevens, 2016), Pertama adalah memastikan akses gizi dan pangan kepada setiap orang, terutama orang miskin dan orang yang sedang dalam kondisi rentan. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa pemberian akses gizi kepada masyarakat harus merata, masyarakat miskin juga harus diperhatikan agar nantinya mereka tidak kekurangan gizi. Kedua adalah mengakhiri kekurangan gizi, negara tanpa kelaparan harus menyediakan berbagai kebutuhan pangan untuk mencegah kekurangan gizi yang dialami oleh masyarakat. Ketiga adalah meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan dan industri kemaritiman. Tidak dapat dipungkiri bahwa industry pertanian, peternakan, perkebunan dan maritime adalah ujung tombak utama untuk mewujudkan ketahanan pangan. Selanjutnya di Indonesia sendiri diterbitkan peraturan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan untuk menjaga lahan pertanian yang berdampak kepada produksi tetap terjaga.

Dengan kondisi yang sedemikian rupa, dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian memegang peranan utama untuk mencapai tujuan tanpa kelaparan. Sehingga pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat Kota Malang harus dilaksanakan dengan kerjasama dengan pihak lain. Kota Malang hanya mampu untuk menjadikan daerah mereka sebagai daerah dengan ketahanan pangan yang baik, dengan kondisi lahan pertanian yang sedemikian rupa untuk mencapai konsep kedaulatan pangan atau bahkan kemandirian pangan sangat sulit untuk direalisasikan di Kota Malang. Badan usaha milik negara (BUMN) yang

diperkenankan untuk mengurus masalah ketahanan pangan nasional adalah Perum Bulog (Nasution, 2017).

Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 bahwa pemberian wewenang kepada Bulog untuk menyikapi *nation food security* yang diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan perniagaan. Dalam kasus ini, pemerintah Kota Malang harus melaksanakan kerjasama dengan Perum Bulog secara intensif dan *suistenable*. Karena ketika suatu daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri, kenaikan harga akibat dari monopoli yang dilakukan oleh pedagang tidak dapat dihindarkan. Data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistika Kota Malang menyatakan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok pada awal bulan Maret 2019 sebesar 0,48 persen akan berkontribusi kepada kenaikan inflasi sebesar 0,0712 (Sindonew Jatim, 2018). Sehingga untuk mencegah kenaikan harga bahan pokok yang berdampak kepada inflasi, pemerintah Kota Malang bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub. Regional Malang terus berupaya untuk menjaga ketersediaan pangan berupa bahan pokok serta menjaga stabilitas harga. Hubungan yang terjadi antara pemerintah Kota Malang dengan Perum Bulog membentuk suatu kerangka yang dinamakan dengan jejaring. Jejaring yang dilakukan oleh instansi yang telah disebutkan diatas akan membentuk suatu jejaring yang secara teoritis disebut dengan Tata Kelola Jaringan pemerintahan (*Network Governance*).

Tata kelola jaringan pemerintah adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama antara entitas melalui pembentukan tatanan pribadi dan untuk merancang sebuah mekanisme jejaring baik dalam bentuk kontrak ataupun non-kontrak dan memungkinkan untuk mengikat mitra kerja dalam sebuah aturan yang tertulis (De

Francesco, 2016). Pendapat lain juga menjelaskan bahwa tata kelola jaringan pemerintah adalah pola kerjasama yang telah diakui sebagai bentuk penting dari pemerintahan multiorganisasi. Jaringan pemerintah dapat diartikan sebagai kombinasi antar struktur dalam pemerintahan atau secara sederhana dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama antar lembaga pemerintah (Sørensen, 2016). Penggunaan tata kelola dalam jaringan pemerintah adalah untuk menciptakan suatu kebijakan yang mandiri. Mandiri disini diartikan bahwa mereka tidak memerlukan bantuan dari pihak lain yang berada di luar jaringan. Untuk alasan itu tata kelola jaringan pemerintah membutuhkan reputasi, kepercayaan, timbal balik, saling ketergantungan dan saling menguntungkan. Secara sederhana *Network governance* dapat diartikan sebagai salah satu proses dalam debirokratisasi agar menciptakan tatanan birokrasi yang mudah dan tidak berbelit-belit dengan pembagian wewenang untuk masing-masing actor yang terjalin dalam suatu jaringan. Dalam teori tata kelola jaringan terdapat berbagai indikator yang dimunculkan, namun secara garis besar dalam teori tata kelola jaringan pemerintah adalah interaksi antar actor, pembagian wewenang, hingga interdependensi dan kerjasama.

Berbeda dengan teori kerjasama yang biasa dilaksanakan, teori tata kelola jaringan pemerintahan ini juga akan menjelaskan bagaimana masing-masing instansi akan memiliki wewenang mereka masing-masing yang dijalankan secara independen. Dengan artian lain bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, dan Perum Bulog akan menjalankan wewenang mereka masing-masing, seperti Dinas Ketahanan Pangan yang akan melaksanakan pemantauan produksi gabah, Dinas Perdagangan yang akan melaksanakan pemantauan harga, dan perum bulog yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan gabah untuk

kebutuhan masyarakat Kota Malang. Selain kewenangan masing-masing actor yang telah dijelaskan diatas maka juga akan dijelaskan bahwa mereka akan menjadi suatu kesatuan ketika diperlukan dalam sebuah kegiatan, misalnya kegiatan operasi pasar. Secara sederhana teori Tata Kelola Jaringan Pemerintah berdasarkan penjelasan diatas memiliki beberapa pokok substansi antara lain kewenangan masing-masing actor yang independen, interdependensi antar actor, serta kerjasama yang suatu waktu akan diperlukan. Maka dari itu dalam penelitian ini akan digunakan teori tata kelola jaringan pemerintahan yang secara teoritis memang lebih kompleks dan lebih menarik daripada teori kerjasama atau koordinasi secara umum. Terlebih lagi dalam penelitian ini nantinya juga akan dibahas mengenai intervensi antar actor, hingga bagaimana masing-masing actor memiliki kepentingan masing-masing yang akan berdampak kepada kebijakan yang ada dalam jaringan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dengan adanya latar belakang tersebut diatas, penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tata Kelola Jaringan Pemerintahan (*Network Governance*) Dalam Pemenuhan Ketersediaan Pangan di Kota Malang?
2. Permasalahan apa yang dihadapi dalam Tata Kelola Jaringan Pemerintahan (*Network Governance*) Dalam Pemenuhan Ketersediaan Pangan di Kota Malang?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana Tata Kelola Jaringan Pemerintahan (*Network Governance*) Dalam Pemenuhan Ketersediaan Pangan di Kota Malang?

2. Untuk mengidentifikasi Permasalahan apa yang dihadapi dalam Tata Kelola Jaringan Pemerintahan (*Network Governance*) Dalam Pemenuhan Ketersediaan Pangan di Kota Malang?

1.4 MANFAAT PENELITIAN

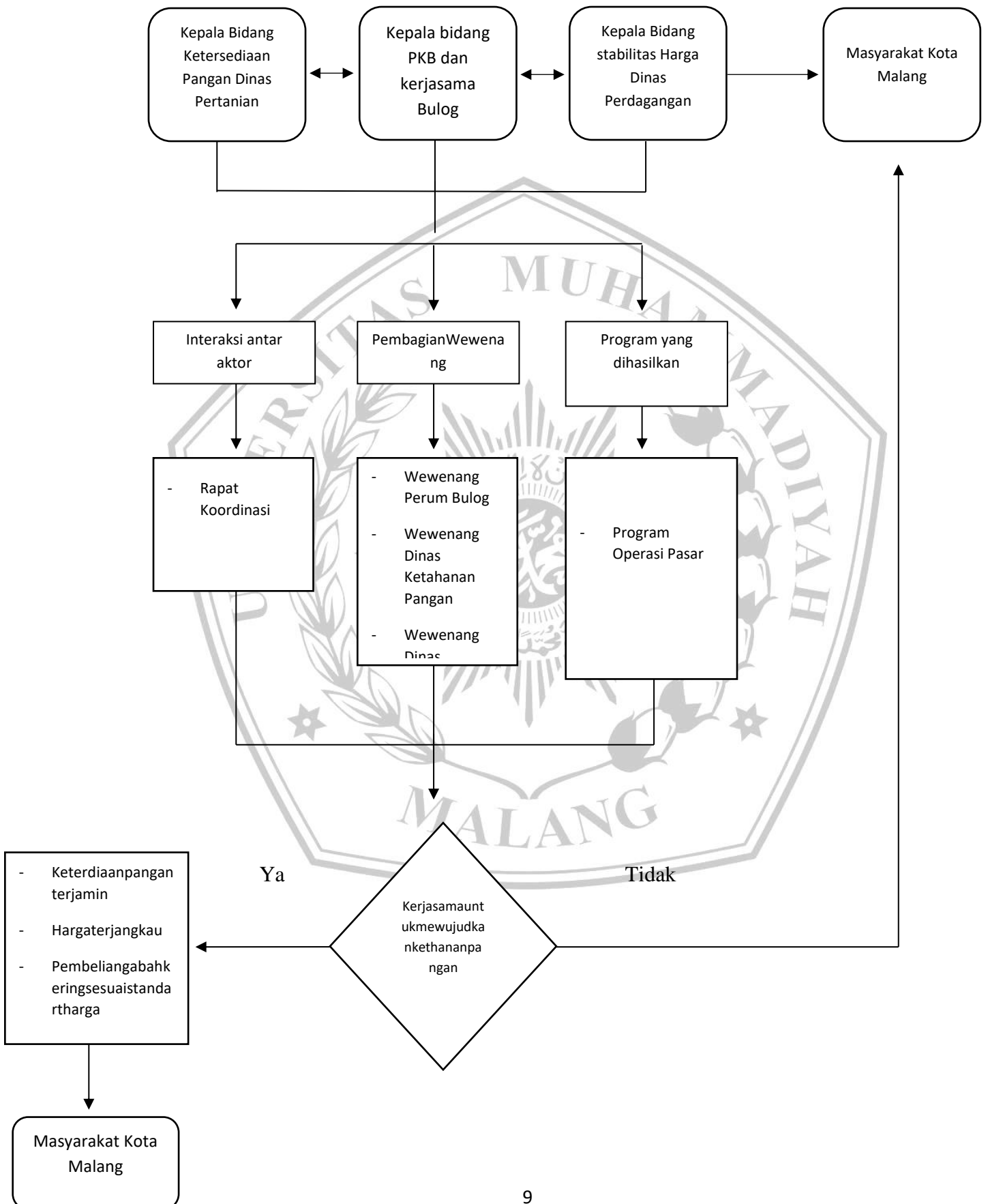
1. Manfaat teoritis

Manfaat pertama dalam adalah bagaimana penelitian ini berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada dari sisi disiplin ilmu pemerintahan. Dalam penelitian ini peneliti berusaha menganalisis peraturan-peraturan yang telah diciptakan oleh pemerintah, selain itu dalam penelitian ini berusaha mengaktualisasi teori-teori yang didapat dikelas dengan kondisi riil di lapangan. Penelitian ini juga sebagai ajang bagi peneliti untuk menambah wawasan, selain proses pembelajaran di kelas peneliti juga akan menganalisis bagaimana kondisi riil di lapangan. Sehingga pada akhirnya wawasan mengenai praktik lapangan didapatkan oleh peneliti.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat membuat pemerintah lebih baik dalam melaksanakan peraturan yang telah mereka buat, hingga pemberian pelayanan public kepada masyarakat.

1.5 KERANGKA BERPIKIR



Dalam penelitian ini, pembuatan kerangka berpikir dimulai dari aktor. Dalam kerangka berpikir diatas, yang menjadi unit analisis data adalah lembaga. Lembaga yang akan dianalisis adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang, Dinas Perdagangan Kota Malang, serta Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Kota Malang. Setelah lembaga yang akan dianalisis terpenuhi, maka selanjutnya menuju indikator yang terdapat pada teori. Seperti yang diketahui bersama bahwa *Network Governance* memiliki empat indikator, yaitu pembagian wewenang, peraturan yang mengatur hubungan antar lembaga, interaksi antar aktor, hingga program yang dihasilkan dalam kerjasama tersebut.

Dari masing-masing indikator yang telah disebutkan diatas, akan memunculkan item. Item tersebut didapatkan dari definisi masing-masing indikator. Dari indikator interaksi antar aktor memunculkan dua item yaitu rapat koordinasi dan perumusan kebijakan bersama. Indikator pembagian wewenang menghasilkan tiga item yaitu wewenang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang, wewenang Dinas Perdagangan Kota Malang, serta wewenang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre Malang. Selanjutnya indikator peraturan yang mengatur menghasilkan item MOU antar lembaga, dan yang terakhir indikator program yang dihasilkan menghasilkan dua item yaitu program operasi pasar dan program pembelian gabah kering dari petani oleh Perum Bulog. Indikator dan item yang telah dijelaskan akan menjadi sebuah keputusan, keputusan yang dihasilkan adalah kerjasama antar lembaga untuk mewujudkan ketahanan pangan. Keputusan tersebut akan menghasilkan dua hasil, jawaban ya atau tidak. Jika tidak alur berpikir akan kembali kepada masyarakat, dengan kata lain apabila kerjasama tidak dapat terjalin akan mengakibatkan masalah dalam

ketahanan pangan kembali diterima oleh masyarakat. Sedangkan jawaban ya, akan menghasilkan manfaat ketersediaan pangan terjangkau, harga terjangkau, dan pembelian gabah kering oleh Perum Bulog sesuai dengan standart harga. Dampak baik yang ditimbulkan tersebut juga akan kembali kepada masyarakat.

1.6 DEFINISI KONSEPTUAL

A. Tata Kelola Jaringan Pemerintahan

Tata kelola jaringan pemerintahan adalah pola jejaring telah diakui sebagai bentuk penting dari pemerintahan multiorganisasi. Jaringan pemerintah dapat diartikan sebagai kombinasi antar struktur dalam pemerintahan atau secara sederhana dapat diartikan sebagai bentuk jejaring antar lembaga pemerintah (Sørensen, 2016). Tata kelola jaringan pemerintahan dewasa ini telah menjaga salah satu solusi ketika terjadi kebuntuan organisasi pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Secara sederhana ketika satu organisasi pemerintah tidak mampu untuk menyelesaikan masalah maka mereka memerlukan bantuan organisasi pemerintah lain agar penyelesaian masalah dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan. Aktor yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, dan Perum Bulog. Dengan kondisi Kota Malang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat mereka sendiri, maka diperlukan suatu kerjasama pemerintah guna mengatasi masalah tersebut. Perum Bulog memang memiliki wewenang untuk menjaga ketersediaan pangan secara nasional terjaga, maka tata kelola jaringan pemerintah dengan pemerintah daerah setempat menjadi sesuatu yang harus dilakukan agar pemberian pelayanan public kepada masyarakat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam kontekstualisasi Tata kelola jaringan pemerintahan dalam penelitian ini perlu untuk melihat empat aspek utama. Pertama adalah bagaimana para actor yang tergabung di dalam jaringan memiliki ketergantungan satu sama lain. Untuk penelitian ini pemerintah Kota Malang yang diwakili oleh Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Ketahanan Pangan memiliki ketergantungan kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan perkotaan di Kota Malang. Kegiatan jaringan pemerintah ini tidak dapat berjalan secara maksimal ketika salah satu dari pemangku kepentingan tidak menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan baik. Kedua adalah bagaimana konsekuensi yang diterima dari ketergantungan antar actor akan menyebabkan perbedaan persepsi, sehingga akan muncul negosiasi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Negosiasi dan pembahasan ini biasanya akan memunculkan sebuah program untuk penyelesaian masalah. Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Kota Malang, muncul beberapa program tata kelola jaringan antar instansi dalam jaringan yang telah dijelaskan diatas. Ketiga adalah manajemen jaringan, manajemen jaringan disini dimaksudkan sebagai koordinasi antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perum Bulog. Manajemen jaringan mengatur tentang fasilitasi interaksi hingga dialog antar pemangku kepentingan.

B. Ketersediaan Pangan

Pangan adalah salah satu kebutuhan primer bagi setiap individu yang harus terpenuhi setiap saat. Maka dari itu dijelaskan bahwa setiap negara harus memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya berapapun yang mereka butuhkan. Mengingat bahwa kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi akan menyebabkan kepincangan dalam ekonomi (Mayrowani, 2016). Ketersediaan pangan merupakan

terpenuhinya pangan bagi masyarakat dari sisi mutu, keterjangkauan, dan harga yang dapat dijangkau. Terkhusus untuk Indonesia, pangan adalah beras. Beras merupakan bahan pokok wajib masyarakat Indonesia setiap harinya. Dengan kata lain kekurangan beras bagi masyarakat Indonesia juga berarti bahwa pemerintah menegaskan bahwa mereka sedang dalam masalah ekonomi.

Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk mencukupi bahan pangan masyarakat Indonesia terutama untuk beras. Pemerintah telah berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia mulai dari sisi produksi hingga bagaimana distribusinya kepada masyarakat. Tetapi dengan perkembangan zaman maka sebagian daerah di Indonesia berubah menuju industrialisasi atau menuju bidang lain. Salah satu contoh adalah Kota Malang, dengan kondisi luas lahan pertanian yang semakin menipis dibarengi dengan penurunan jumlah petani, maka mereka tidak dapat menjadi produsen pangan bagi daerah mereka sendiri. Untuk menuju ketahanan pangan, Kota Malang harus melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama dilakukan dengan Perum Bulog yang secara khusus diberikan tugas untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

1.7 DEFINISI OPERASIONAL

1. Tata Kelola Jaringan Pemerintahan (*Network Governance*) Dalam Pemenuhan Ketersediaan Pangan di Kota Malang.
 - a. Interaksi antar actor dalam Tata Kelola Jaringan Pemerintahan (*Network Governance*) Dalam Pemenuhan Ketersediaan Pangan di Kota Malang

- b. Kewenangan antar actor dalam Tata Kelola Jaringan Pemerintahan (*Network Governance*) Dalam Pemenuhan Ketersediaan Pangan di Kota Malang.
 - c. Interdependensi dan Kerjasama Melalui Program Operasi Pasar.
2. Permasalahan dalam Tata Kelola Jaringan Pemerintahan (*Network Governance*) Dalam Pemenuhan Ketersediaan Pangan di Kota Malang.

1.8 METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pengumpulan data secara ilmiah (Gumilang, 2016). Penelitian kualitatif merupakan salah satu agenda untuk menafsirkan fenomena dengan cara menjelaskan secara detail. Metode penelitian tidak menggunakan metode statistika ataupun hitung-hitungan. Penelitian ini menggunakan penjelasan secara spesifik menggunakan table, foto ataupun catatan dan dokumen yang ditemukan dilapangan. Maka dari itu penelitian kualitatif tidak menggunakan kuisioner ataupun data sebaran lainnya, melainkan hanya melakukan wawancara dengan orang yang telah dipilih menjadi responden dengan persyaratan tertentu.

2. Sumber Data

Untuk mengetahui bagaimanata kelola jaringanantara pemerintah dan BUMN untuk memperkuat ketahanan pangan perkotaan di Kota Malang peneliti akan memerlukan data yang dapat didapatkan dari instansi terkait ataupun dari sumber-sumber sekunder yang dapat membantu. Berdasarkan data tersebut

didapatkan dengan mengunjungi kantor instansi terkait. Berdasarkan hal tersebut peneliti memilih dua sumber data yang akan dicari didalam penelitian nantinya (Manzilati, 2017). Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui metode wawancara, observasi, serta berbagai macam cara lainnya. Sedangkan untuk data sekunder didapat dengan studi literature. Berikut adalah penjelasannya:

a. Data Primer

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber data melalui wawancara dengan subjek yang meliputi berbagai hal mengenai kerjasama untuk memperkuat ketahanan pangan perkotaan di Kota Malang. Selain wawancara, peneliti juga akan melakukan observasi tertakit dengan tema yang diambil. Sehingga pada akhirnya peneliti akan mengetahui bagaimana kondisi yang ada.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari pembelajaran yang telah dilakukan pada peraturan perundangan, dokumen resmi pemerintah terkait dengan topik yang dibahas. Selain itu peneliti juga akan mendapatkan referensi dengan mencari jurnal-jurnal yang mirip dengan penelitian yang dilakukan. Misalnya jurnal yang membahas tentang ketahanan pangan atau jurnal yang membahas tata kelola jaringan secara spesifik.

3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan mengunjungi individu yang memiliki informasi tentang tata kelola jaringan dalam hal ketahanan pangan di Kota Malang.

Peneliti akan mengunjungi beberapa kantor instansi pemerintah yang memiliki wewenang dalam hal tersebut. Berikut adalah subjek penelitian dalam skripsi ini:

- a. Kepala bidang PKB dan kerjasama perum bulog.
- b. Kepala bidang ketersediaan, distribusi, dan kerawanan pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang.
- c. Kepala bidang Stabilisasi Harga dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Malang

4. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik penumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mengumpulkan data tertulis baik yang ada dalam instansi pemerintahan maupun yang ada dalam sumber lain. Untuk mendapatkan dokumen tersebut peneliti dapat mengunjungi kantor instansi pemerintah yang memiliki kewenangan. Peneliti akan mengunjungi kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang, Dinas Perdagangan Kota Malang, serta Perum Bulog Subdivre Malang. Dokumentasi yang dikumpulkan dapat berupa risalah rapat, jumlah distribusi beras, jumlah produksi gabah, dan data lain yang terkait.

b. Wawancara

Selanjutnya setelah mendapatkan dokumen peneliti akan melaksanakan wawancara untuk mengklarifikasi apakah dokumen yang didapatkan benar dan sesuai dengan apa yang diinginkan dengan melaksanakan wawancara.. Wawancara

memudahkan kita dalam mendapatkan informasi langsung dari responden yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi yang kejelasannya terjamin, peneliti melakukan *face to face interview* dengan subjek penelitian. Peneliti juga akan mengkonfirmasi dokumen yang didapatkan dengan metode wawancara ini, sehingga akan memudahkan nantinya dalam menganalisis data. Data hasil wawancara akan ditulis dan direkam sehingga nantinya penulis dapat mengingat apa yang telah didapatkan dari hasil wawancara.

c. Observasi

Peneliti melakukan observasi secara langsung serta menganalisa kebijakan kerjasama pemerintah dan BUMN dalam pemenuhan kebutuhan pangan di Kota Malang untuk mendapatkan data sebagai bahan analisa. Dalam observasi ini peneliti akan melihat bagaimana gudang distribusi pangan bulog dalam melakukan distribusi pangan di Kota Malang, Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, program *on farm*, serta kegiatan yang dilaksanakan bersama dengan Perum Bulog seperti Operasi Pasar yang sering dilaksanakan di pasar tradisonal.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan untuk meruntukan data yang didapatkan dari proses wawancara, dokumentasi dan tahapan observasi. Dalam teknis analisis data ini juga akan dipilah mengenai data yang perlu untuk digunakan dan data yang tidak perlu untuk digunakan. Perlu ditekankan lagi bahwa dalam penelitian ini tidak menggunakan unsur statistika sehingga tidak akan mengolah angka sebagai data yang digunakan untuk mendukung argumentasi dalam penelitian ini. Dalam teknik analisis data Creswell membagiinya menjadi beberapa tahapan yaitu (Creswell, 2015):

- a. Proses penyarinigan data dan perencanaan data yang digunakan. Tahapan ini adalah mengolah dokumen dan menyinkronkan dengan wawancara, sehingga akan menciptakan suatu pendukung argument dalam penelitian ini. Mengolah data dan mempersiapkan data untuk analisis, langkah ini termasuk transkripsi wawancara dan menyusun sumber informasi. Setelah mendapatkan data dalam penelitian, data tersebut akan dipilah dan diolah. Data yang didapatkan seperti produksi beras Kota Malang, penurunan luas lahan pertanian, jumlah distribusi beras yang dilakukan oleh Perum Bulog serta data wawancara dari narasumber yang telah dijelaskan akan diolah menjadi narasi deskriptif. Data yang didapatkan tidak semua akan dianalisis dalam penelitian. Peneliti akan memilih data mana yang sesuai dengan variable sehingga nanti tidak terjadi kekeliruan dalam menyusun analisis.
- b. Selanjutnya adalah menginterpretasikan makna dari data yang diperoleh. Dalam hal ini akan diperlihatkan secara rinci mengenai data yang diperoleh tentang tata kelola jaringan, data yang diperoleh akan disimpulkan sehingga muncul satu gagasan umum yang akan memberikan klarifikasi terhadap topik penelitian.
- c. Setelah itu akan dilaksanakan pendeskripsian tentang masing-masing data yang telah diperoleh. Data yang didapatkan akan dipilah untuk memahami lebih dalam dari esensi dari data tersebut. Misalnya data terkait dengan produksi beras di Kota Malang, maka peneliti akan menganalisis apa yang menjadi penyebab produksi beras di Kota Malang minimal? Sehingga pada akhirnya akan menambah data baru sebagai pendukung.

- d. Proses yang terakhir adalah proses untuk menerjemahkan bagaimana data yang diperoleh akan dinarasikan dalam deskriptif, sehingga akan memudahkan pembaca untuk memahaminya. Dalam penggunaan deskripsi penelitian memberikan gambaran yang cukup dan peneliti menganalisis data dalam semua sumber misalnya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini nantinya semua data yang didapatkan akan dielaborasi menjadi satu karya ilmiah.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang yang terletak Jl. Kolonel Sugiono No.176 Ciptomulyo, Kec. Sukun Kota Malang, Dinas Perdagangan Kota Malang yang bertempat di Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No. 6, Madyopuro, Kec. Kedungkandang Kota Malang, serta Kantor Perum Bulog Regional Malang yang berada di Jl. Retawu No. 16, Oro-oro dowo, Kec. Klojen, Kota Malang